



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMMAD HATTA ARISANDI**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **79144**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

3.076.720.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000
2. Tanah Seluas 3642 m2 di TAKALAR, HASIL SENDIRI Rp. 127.470.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/64 m2 di KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 425.750.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/64 m2 di KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 416.000.000
5. Tanah Seluas 100 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/100 m2 di KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 437.500.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/80 m2 di KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

181.000.000

1. MOBIL, TOYOTA HILUX PICK UP DOBEL CABIN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

176.021.500

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

159.634.503



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.593.376.003
III. HUTANG	Rp.	216.370.762
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.377.005.241

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.